



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/
NOMOR 32/PMK.02/2013
TENTANG
TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA (2)
UNIT ESELON I (3) } KOP Kementerian/Lembaga
Satuan Kerja (4)
Alamat (5)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : (6)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (7)

NIP/NRP : (8)

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013.
2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
4. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
5. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.
6. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini, menanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

.....(9)

Kuasa Pengguna Anggaran

Materai
6000

.....(10)

NIP/NRP.(11)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan:

1. Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga.
2. Diisi dengan uraian nama Kementerian/Lembaga.
3. Diisi dengan uraian nama unit Eselon I.
4. Diisi dengan uraian nama Satker.
5. Diisi dengan alamat.
6. Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
7. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
8. Diisi dengan NIP/NRP.
9. Diisi dengan tempat dan tanggal.
10. Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Diisi dengan NIP/NRP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA(2)
UNIT ESELON I.....(3) } KOP Kementerian/Lembaga
Alamat(4)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6)

NIP : (7)

Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I (8)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah diteliti, diperiksa kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan.
2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja dan unit Eselon I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
3. Dalam hal pagu anggaran berubah, usul Revisi Anggaran telah dibahas dengan unit Inspektorat terkait.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

..... (9)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/Pejabat Eselon I

Materai
6000

..... (10)

NIP/NRP..... (11)

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Keterangan:

1. Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga.
2. Diisi dengan uraian nama Kementerian/Lembaga.
3. Diisi dengan uraian nama unit Eselon I.
4. Diisi dengan alamat Eselon I.
5. Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
6. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
7. Diisi dengan NIP/NRP.
8. Diisi dengan uraian jabatan penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai keperluan.
9. Diisi dengan tempat dan tanggal.
10. Diisi dengan nama pejabat penanda tangan.
11. Diisi dengan NIP/NRP

Salinan sesuai dengan aslinya

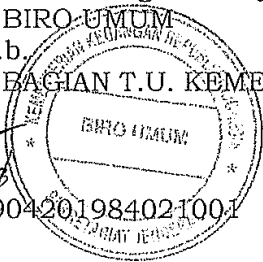
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO